



Contents lists available at [Journal IICET](https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Model tata kelola pemerintah untuk memitigasi krisis akibat Covid-19 dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat

Abdul Nadjib^{*)}, Oemar Madri Bafadhal

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oct 09th, 2021

Revised Nov 02nd, 2021

Accepted Des 28th, 2021

Keyword:

Pandemi Covid-19

Good governance

Model tata kelola pemerintah

Mitigasi krisis

Kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Covid-19 telah menimbulkan krisis yang membutuhkan penanganan dan kebijakan pandemi di berbagai Negara termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan tata kelola untuk mengurangi dampak kemiskinan di Ibukota Indonesia membahas mengenai koordinasi pemerintah dalam merespon dampak pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Sumber data diambil secara tidak langsung dari hasil pencarian (browsing) secara online yang meringkas dataset dari OECD, SMERU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian keuangan. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi krisis melalui kebijakan dan tata kelola. Meskipun terdapat kerumitan dan birokrasi kelembagaan, namun penerapan Prinsip-prinsip tata kelola, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas tetap berjalan lancar. Kesimpulannya, kebijakan komprehensif untuk memitigasi situasi krisis telah disiapkan mulai tanggap darurat, penanganan dampak sosial-ekonomi, dan model kesiapsiagaan ke depan. Melalui mekanisme partisipasi dan transparansi, pemerintah Indonesia telah memberikan serangkaian prosedur yang wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memberikan akses kepada masyarakat secara sosial-ekonomi melalui program kartu pra-kerja dan rencana respon lainnya. Diusulkan agar sinergi dan koordinasi diperluas ke tingkat internasional untuk mengatasi meningkatnya kemiskinan akibat dampak krisis tersebut



© 2021 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Abdul Nadjib,

Universitas Sriwijaya

Email: anadjib.salatti@gmail.com

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah memunculkan dampak yang mengganggu berbagai sektor seperti sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Penanganan yang tidak tuntas dapat memperparah masalah kemiskinan dan gangguan ekonomi (Loayza & Pennings, 2020). Meskipun terdapat perkembangan ekonomi dan teknologi kesehatan, namun dampak akibat pandemic itu dari sisi kemiskinan jarang diulas dan diteliti. Ditambah lagi dengan beban ekonomi akibat krisis wabah tersebut, masyarakat menghadapi ketidakpastian dan ketidakpercayaan yang berdampak pada kemiskinan dan penurunan kesejahteraan (Bozkurt et al., 2020). Laporan Bank Dunia dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi 2020 hanya sekitar 2%, dan cenderung minus setelah 2020 (Djalante et al, 2020). Diperkirakan 8,5 juta orang akan menjadi lebih miskin karena COVID-19. Pada 13 April 2020, 2,8 juta pekerja dilaporkan diberhentikan dari

pekerjaan mereka sebagai akibat dari krisis ini, dan PHK masih terus terjadi (Azzahra, 2020). ADB (Asian Development Bank) memperkirakan angka pengangguran akibat COVID-19 dapat mencapai 7,2 juta orang.

Sistem tata kelola krisis standar cenderung menangani masalah pandemic secara terpisah-pisah tanpa ada koordinasi dan sinergi sehingga pemerintah berpotensi kehilangan relevansi, dan mengambil kebijakan yang cenderung bersifat trial and error. Dengan demikian perlu memetakan tantangan dihadapi para pelaksana tata kelola kebijakan untuk mengambil tindakan mengurangi dampak krisis akibat COVID-19 (Jackson et al., 2020).

Tantangan tersebut dapat berupa langsung maupun tidak langsung dimana COVID-19 mengakibatkan berbagai dampak negatif dari sisi ekonomi yang memperparah kemiskinan masyarakat (Guerrieri et al., 2020). Pada mekanisme langsung, pekerja terinfeksi yang berakibat mengurangi kapasitas produksi. Atkeson (2020) menyatakan bahwa ketika 10 persen populasi terinfeksi, infrastruktur ekonomi utama akan menghadapi kekurangan staf yang parah. Pada mekanisme tidak langsung, pembatasan aktivitas sosial (social distancing) dengan tujuan reduksi penyakit mengurangi kontak interpersonal yang berakibat komunikasi dan kerjasama antar warga menjadi terbatas sehingga mengurangi jam kerja dan berdampak pada perdagangan maupun sector konsumsi (Guerrieri et al., 2020). Pemodelan oleh Eichenbaum, Rebelo, dan Trabandt (2020) menunjukkan bahwa kebijakan reduksi penyakit dapat menyelamatkan nyawa tetapi memperburuk resesi ekonomi. Efek jangka panjang yang bersifat tidak langsung adalah efek histeresis pengangguran dan perdagangan antar wilayah.

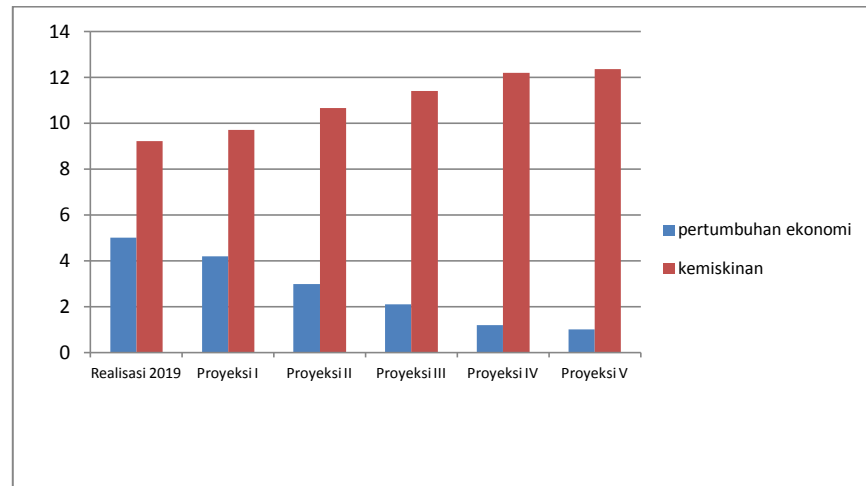
Perkiraan terbaru dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dirilis pada Juni 2020 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi global akan turun 6% pada 2020 dan pengangguran naik menjadi 9,2% dari 5,4% pada 2019. Ini adalah skenario tanpa gelombang kedua. Dalam kasus gelombang kedua dengan penguncian baru, maka OECD memperkirakan penurunan 7,6%, sebelum naik kembali menjadi 2,8% pada tahun 2021 (OECD, 2020). Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) diperkirakan akan menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Dampak ekonomi diperkirakan akan besar dan dapat menyebabkan resesi global. Jutaan orang akan didorong ke dalam kemiskinan (Barua, 2020).

Dalam tulisan ini, akan membahas bagaimana kebijakan good governance dalam mengatasi kemiskinan yang diakibatkan dari dampak COVID-19 di Indonesia. Satu proyeksi menempatkan 1,2 juta orang di negara itu pada akhirnya akan terinfeksi. Dampak ekonomi juga diperkirakan akan parah (Suryahadi et al., 2020). Dibandingkan dengan proyeksi dasar pertumbuhan ekonomi 5 persen pada tahun 2020, berbagai penelitian memperkirakan bahwa COVID-19 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi antara 1 dan 4 persen. Berdasarkan perkiraan tingkat kemiskinan akan meningkat dari 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada akhir 2020 (Suryahadi et al., 2020). Ini menyiratkan bahwa 1,3 juta lebih banyak orang akan didorong ke dalam kemiskinan. Di bawah proyeksi paling parah, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4 persen, menyiratkan 8,5 juta lebih banyak orang akan menjadi miskin (Suryahadi et al., 2020). Yang terakhir berarti bahwa kemajuan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan selama dekade terakhir akan terhapus. Implikasinya adalah bahwa Indonesia perlu memperluas program perlindungan sosialnya untuk membantu kaum miskin baru di samping kaum miskin yang ada.

Mengingat skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sifat multi-sisi dari krisis COVID-19, perbandingan dengan yang sebelumnya, termasuk krisis keuangan 2008-2009, memiliki keterbatasan yang signifikan. COVID-19 terbukti unik pada generasinya baik dari sisi penawaran maupun guncangan sisi permintaan, dan dampaknya pada semua sektor dan wilayah di dunia (Brouder, 2020). Selain itu, upaya untuk menahan resesi yang disebabkan oleh COVID-19 tampaknya menghasilkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi (Standard & Poor's, 2020). Dampak krisis COVID-19 juga sangat heterogen, dengan dimensi teritorial yang kuat yang memiliki implikasi kebijakan penting untuk mengelola konsekuensinya. Berdasarkan hal tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan good governance dalam mengurangi kemiskinan diakibatkan oleh covid 19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 akan memiliki efek jangka pendek dan menengah yang membutuhkan model tata kelola yang tepat baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Prioritas jangka panjang harus dimasukkan dalam tindakan tanggap darurat untuk meningkatkan ketahanan sistem ekonomi dan sosial di tiap wilayah Indonesia.

COVID-19 akan berdampak pada kemajuan masa lalu dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia. Sebuah studi baru-baru ini oleh Lembaga Penelitian SMERU memperkirakan bahwa tambahan 5,9 juta hingga 8,5 juta orang akan menjadi miskin jika pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari 5% menjadi 2,1% dan selanjutnya menjadi 1% pada tahun 2020, seperti yang diperkirakan saat ini. Lonjakan angka kemiskinan berarti bahwa program perlindungan sosial yang lebih besar diperlukan tidak hanya untuk mengatasi kaum miskin yang ada, tetapi juga kaum miskin yang baru. Sumber daya yang dibutuhkan untuk memperluas perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan secara signifikan.

Segmen populasi yang lebih miskin lebih cenderung hidup dalam kondisi yang penuh sesak, akibatnya memiliki sedikit perubahan untuk mempraktikkan jarak sosial yang efektif atau, jika terjadi gejala atau paparan terhadap penyakit, isolasi diri. Sebagai negara dengan urbanisasi yang cepat, diperkirakan bahwa hanya di bawah 22 persen dari populasi perkotaan Indonesia yang tinggal di perumahan di bawah standar dengan infrastruktur yang rusak atau tidak lengkap. Penduduk di daerah-daerah ini, termasuk anak-anak, lebih mungkin dikecualikan dari layanan dasar. Dalam hal ini, rumah tangga yang dikepalai tunggal mungkin merasakan dampak dari wabah COVID-19 yang lebih parah, terutama jika anggota rumah tangga jatuh sakit, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan.



Gambar 2. Proyeksi tingkat kemiskinan penduduk Indonesia tahun 2020

Penyebaran virus corona (Covid-19) telah menginfeksi jutaan orang di dunia. Pandemi ini juga berdampak terhadap kinerja perekonomian dan berpotensi menyebabkan resesi global (Sohrabi et al., 2020). The SMERU Research Institute dalam laporannya yang berjudul “The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia” menunjukkan pelemahan ekonomi akibat Covid-19 berdampak terhadap peningkatan penduduk miskin di Indonesia (Suryahadi et al., 2020).

Pada skenario terburuk, jika ekonomi tumbuh hanya 1%, maka tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 12,37%. Angka ini meningkat dari 2019 yang memiliki tingkat kemiskinan satu digit sebesar 9,22%. Laporan tersebut menjelaskan kemajuan Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir akan musnah. Maka dari itu, pemerintah perlu memperluas program perlindungan sosial untuk melindungi penduduk miskin yang semakin bertambah.

Pada saat pandemi COVID-19, perempuan dan anak perempuan mungkin berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan pasangan intim dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya karena meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga (Mazza et al., 2020). Karena sistem yang biasanya melindungi perempuan dan anak perempuan, termasuk struktur masyarakat, dapat melemah atau rusak, diperlukan langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan, seperti jalur rujukan yang diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam fasilitas yang tersedia. Demikian pula, ini juga dapat berdampak pada orang-orang transgender, karena mereka mungkin mengalami peningkatan risiko kekerasan pasangan intim dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan ekonomi selama pandemi COVID-19 (Zhang et al., 2020).

Metode

Sesuai tujuannya untuk menilai dan mengevaluasi program kerja pemerintah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review. Literature review merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu (Cooper, 2010). Sumber data diambil secara tidak langsung dari hasil pencarian (browsing) secara online yang meringkas dataset dari OECD, SMERU, Kementerian Dalam Negeri, kementerian keuangan. Data-data kemudian diintisarikan untuk memodelkan kebijakan good governance dilakukan pemerintah untuk memitigasi dampak krisis terhadap kemiskinan yang diakibatkan dari dampak COVID-19 di Indonesia. Sesuai tujuannya untuk menganalisis upaya pemerintah pada kondisi sosial ekonomi, maka sumber data difokuskan pada dampak ekonomi dan rencana respon untuk mengatasi dampak pandemi.

Hasil dan Pembahasan

Melihat permasalahan diatas dan situasi krisis bersifat multidimensional, maka dibutuhkan penanganan yang bersifat sinergis dan koordinatif (Mueller& Chancellery, 2010). Beberapa langkah telah dilakukan untuk mengatasi krisis melalui kebijakan dan tata kelola yang akan dibahas dibawah ini. melalui proram pemerintah, telah dilakukan sinergi melalui kerjasama instansi dan masyarakat. Meskipun terdapat kerumitan dan birokrasi kelembagaan , namun penerapan Prinsip-prinsip tata kelola, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas tetap berjalan lancar.

Kebijakan-kebijakan untuk mitigasi dampak krisis Covid-19

Pemerintah Indonesia, melalui Satuan Tugas Percepatan Respons terhadap COVID-19, telah mengembangkan Rencana Respons dan Mitigasi Nasional untuk COVID-19. Rencana tersebut telah dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Kesehatan Internasional 2005, yang bertujuan meningkatkan kapasitas inti negara untuk deteksi, verifikasi, pelaporan, dan respons terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC). Indonesia telah mengadopsi pedoman manajemen risiko pandemi WHO dengan menggunakan pendekatan seluruh masyarakat dan selaras dengan sistem manajemen bencana. Secara khusus, Rencana tersebut memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Untuk membatasi penularan wabah COVID-19, kurangi infeksi berikutnya pada komunitas rentan dan petugas kesehatan, termasuk mencegah dampak yang lebih luas karena komorbiditas; 2) Deteksi dini, isolasi dan perawatan dini, termasuk melaksanakan layanan optimal untuk pasien COVID-19; 3) Implementasi tindakan farmasi dan non-farmasi untuk wabah COVID-19; 4) Identifikasi semua persyaratan sumber daya terkait dengan tanggapan COVID-19; dan 5) Mempertahankan ketertiban umum dan keamanan serta stabilitas sosial dan ekonomi selama tanggapan COVID-19.

Rencana Respons dan Mitigasi Nasional untuk COVID-19

Pelaksanaan rencana operasi nasional dibagi menjadi enam komponen, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab khusus: 1) Implementasi komando dan koordinasi; 2) Pengawasan; 3) Tanggapan medis dan laboratorium; 4) Intervensi farmasi; 5) Intervensi non-farmasi; 6) Komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat.

Implementasi dari rencana ini diatur sesuai dengan fase manajemen bencana seperti yang tercantum pada tabel 1.

Table 1. Implementasi rencana mitigasi dampak pandemi sesuai fase manajemen bencana

Status respons	Definisi operasional	Fokus operasional	Agensi Terkemuka
Kesiapan	Tidak ada kasus di Indonesia	Penguatan pengawasan, deteksi dini dan pencegahan	Nasional: Kementerian Kesehatan Daerah: kepala daerah
Kesiapan / peringatan bencana	Kasus awal dan sporadis	Deteksi kasus, penelusuran dan isolasi	Nasional: Kementerian Kesehatan Daerah: kepala daerah
Respon bencana	Minimal dua kelompok meningkat	Deteksi kasus, penelusuran, mitigasi pandemi, jarak fisik, rencana kesinambungan bisnis	Nasional: Kementerian Kesehatan Daerah: kepala daerah
Rehabilitasi	Tidak ada kasus baru setelah dua periode inkubasi dari kasus terakhir	Pengawasan ketat, pengurangan respons, rehabilitasi komponen dan fungsi	Kepemimpinan regional

Program kartu pra-kerja untuk mengatasi dampak pandemi

Dana pelatihan bagi pekerja melalui kartu pra-kerja menjadi prioritas program pemerintah. hingga akhir Maret , Kantor sekretaris Menteri Ekonomi Koordinator Susi wijono Moegiarso mengeluarkan Peraturan Presiden No. 36/2020 untuk implementasi kartu pra-kerja pemerintah dengan tujuan mensubsidi program pelatihan bagi tenaga kerja. Pemerintah ingin menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini di tingkat 4,7 persen meski terdapat penurunan daya beli dan rantai pasokan (Khan & Faisal, 2020).

Kartu pra-kerja memberi masyarakat akses dan pendanaan untuk berbagai pelatihan. Masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 10,3 triliun (US \$ 752,24 juta) tahun ini untuk program ini, menargetkan 2 juta orang untuk bergabung. Susiwiwono mengatakan pemerintah akan menyediakan Rp 500.000 (US \$ 34,32) untuk setiap peserta untuk menutup biaya akomodasi dan transportasi selama program pelatihan. Pemerintah juga telah mencari kemitraan dengan teknologi pendidikan start-up dan platform e-commerce, termasuk Ruangguru dan Bukalapak, untuk memungkinkan peserta untuk mengambil bagian dalam berbagai pelatihan.

Terlepas dari program kartu pra-kerja, pemerintah juga telah meluncurkan stimulus ekonomi untuk meminimalkan dampak negatif dari pandemi COVID-19 di Indonesia, yang meliputi keringanan pajak individu dan perusahaan, serta pelanggaran pembatasan impor. Lebih dari 120.000 orang telah mengontrak COVID-19 di seluruh dunia pada Kamis pagi dengan lebih dari 4.300 kematian. Pemerintah mengumumkan Rabu bahwa 34 orang telah dites positif COVID-19 di negara itu.

Ada beberapa kriteria yang dapat diterapkan guna mengidentifikasi apakah suatu kebijakan berkarakter inklusif (Hankivsky, et al., 2014: 19). Pertama, dokumen kebijakan perlu secara eksplisit menyebutkan ketimpangan-ketimpangan yang disebabkan oleh eksklusi sosial serta secara inklusif memasukkan semua kategori ketimpangan yang ada. Kedua, dokumen kebijakan perlu mengartikulasikan aspek interseksionalitas yang salah satunya berimplikasi pada penyebutan kategori-kategori yang saling beririsan dan bagaimana hal ini akan diatasi. Ketiga, ada tidaknya pendekatan yang transformatif dalam menghadapi isu-isu interseksionalitas, pemahaman tentang struktur hierarki kekuasaan dan dimensi-dimensi ketimpangan yang disebabkan, termasuk di level individual maupun kelompok. Keempat, ada tidaknya kesadaran atau upaya untuk membongkar bias-bias privilese pada dokumen. Kelima, dokumen kebijakan perlu mencegah potensi stigmatisasi pada orang-orang atau kelompok yang mengalami ketimpangan yang beririsan. Keenam, ada/tidaknya konsultasi dengan aktor-aktor masyarakat sipil selama proses pembuatan kebijakan. Ulasan kebijakan ringkas yang terekam dalam Tabel 2 dan tabel review kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia yang menjadi lampiran buku ini akan dipakai untuk menaksir sejauh apa kebijakan tanggap pandemi COVID-19 yang diambil pemerintah pusat dan/ atau berbagai lembaga di tingkat nasional telah memenuhi Kriteria 1 dan 2 dari keenam kriteria di atas.

Tabel 2. Daftar Strategi respon dilakukan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional untuk mitigasi dampak krisis COVID-19

Kementerian/Lembaga	Langkah Strategis	Target
Kementerian Dalam Negeri	- Mengalihkan APBD sebesar 55 triliun rupiah untuk menangani COVID-19. - Mengarahkan Kepala Daerah untuk realokasi APBD menjadi hibah dan bantuan sosial untuk empat sektor utama, yaitu perlindungan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta perlindungan terhadap - Industri UMKM, petani, nelayan, dan peternak agar tetap berproduksi dan dapat melipatgandakannya dalam skala besar.	Penduduk/ keluarga miskin, UMKM, petani, pelayan, peternak
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) dengan anggaran sebesar 10 triliun rupiah yang tersebar di 34 provinsi untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. - Mengalokasikan anggaran stimulus fiskal subsidi perumahan sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 175.000 rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bentuk stimulus fiskal tersebut berupa pengalokasian dana untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk KPR. - Membangun Fasilitas Observasi / Penampungan / Isolasi untuk Pengendalian Infeksi Penyakit	Warga desa, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Kementerian/Lembaga	Langkah Strategis	Target
Kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kepolisian RI	Menular di Pulau Galang. - Merealisasikan beberapa program bantuan sosial seperti: 1) Program Keluarga Harapan, 2) sembako, 3) bantuan langsung tunai, 4) Program Padat Karya Tunai (oleh Kemenkeu), 5) Program Keselamatan (oleh Polri), dan 6) Kartu Prakerja. - Mengeluarkan Pedoman Perlindungan Kesehatan dan Dukungan Psikososial terhadap Penyandang Disabilitas Sehubungan dengan Terjadinya Wabah COVID-19 di Lingkungan Balai Besar/ Balai/ Lokasi Disabilitas, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas, dan Lembaga Lainnya (oleh Kemensos).	Penduduk/ keluarga miskin, penyandang disabilitas
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Bersama BP Jamsostek mengatur rancangan terkait pemberian insentif bagi pekerja yang terkena PHK, di mana direncanakan setiap pekerja akan mendapatkan insentif sebesar 1-5 juta rupiah untuk tiga bulan.	Pekerja yang terkena PHK akibat COVID-19
Kementerian Ketenagakerjaan	Memberikan jaminan BP Jamsostek bagi 1,1 juta pekerja formal yang terkena PHK dan tidak termasuk ke dalam penerima Kartu Prakerja.	Pekerja formal yang terkena PHK
Kementerian Pertanian	Bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) membuat ATM beras gratis untuk kaum dhuafa di daerah-daerah rawan, seperti DKI Jakarta.	Penduduk miskin
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebesar 3,6 miliar rupiah yang diarahkan pada penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 bagi anak dan perempuan. - Mengadakan penyediaan APD dan kebutuhan spesifik untuk lansia. - Memfasilitasi penundaan pembayaran angsuran pinjaman bagi perempuan pra-sejahtera nasabah Mekar. - Meningkatkan kapasitas perempuan pelaku usaha lewat bantuan modal dana bergulir untuk pengembangan usaha dan ketersediaan bahan baku. - Mengeluarkan Panduan Aman COVID-19 untuk Lansia. - Mengeluarkan Panduan Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas dari COVID-19.	lansia, anak, perempuan, penyandang disabilitas

Strategi tata kelola dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah, sektor swasta, organisasi produsen, dan lembaga masyarakat perlu meningkatkan kapasitas untuk merespons dan membuat keputusan dengan lebih baik, untuk memberikan layanan guna membangun rantai nilai inklusif dan menghasilkan lapangan kerja. Pemulihan ekonomi harus lebih fokus pada ketahanan, mempromosikan kebijakan untuk beralih ke sistem produksi yang lebih berkelanjutan yang mengandalkan strategi multisektor untuk mempromosikan ketahanan. Ini termasuk memasang perlindungan sosial dengan dukungan kepada petani kecil dalam mengakses pasar dan mempertimbangkan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai model untuk pembangunan ekonomi, bila sesuai, bersama dengan mempromosikan rantai pasokan yang lebih pendek melalui pendekatan teritorial untuk meningkatkan ketahanan dan ketahanan pangan. Ini membutuhkan promosi sistem pangan lokal dan regional yang lebih kuat, membangun hubungan perkotaan-pedesaan yang mendorong akses produsen skala kecil ke pasar dan yang memastikan akses ke makanan yang lebih beragam dan bergizi untuk populasi perkotaan.

Simpulan

Kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan juga cenderung bersifat reaktif, serta lebih berorientasi pada stabilitas ekonomi, ketimbang kemanusiaan. Pendekatan yang belum berlandaskan nilai inklusi dan belum berorientasi pada kemanusiaan membuat kebijakan-kebijakan yang ada tidak sensitif menangkap problem kerentanan yang timbul sebagai dampak pandemi COVID-19. Dalam jangka menengah dan panjang, pemulihan ekonomi harus lebih fokus pada ketahanan, mempromosikan kebijakan untuk beralih ke sistem produksi yang lebih berkelanjutan yang mengandalkan strategi multisektor untuk mempromosikan ketahanan. Selain itu, perlindungan sosial dalam bentuk uang tunai atau transfer natura, serta asuransi kesehatan dan jaminan terkait tenaga kerja tertentu, adalah kunci untuk mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi. Perlindungan sosial ini memungkinkan kepatuhan dengan tindakan pengurangan. Bagi banyak produsen dan pekerja skala kecil pedesaan, penghasilan dari pendapatan bergantung pada akses fisik mereka ke pasar, dan pekerjaan di pertanian. Kebutuhan dan kekhasan populasi dan mata pencaharian pedesaan, dan khususnya kelompok rentan - seperti perempuan dan anak perempuan, masyarakat adat, orang-orang cacat, orang lanjut usia, migran dan pekerja musiman dan risiko peningkatan pekerja anak, perlu dipertanggungjawabkan ketika merancang dan mengoperasionalkan langkah-langkah baru atau diperluas, termasuk tautan ke proses inklusif pemulihan ekonomi.

Referensi

- Abiad, A., Arao, R. M., & Dagli, S. (2020). The economic impact of the COVID-19 outbreak on developing Asia. <http://dx.doi.org/10.22617/BRF200096>
- Abidah, A., Hidayatullah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38-49.
- Aidha, C. N., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Herawati, H., Ramdhaningrum, H., Ramdhaningrum, M.,... & Thaariq, W. (2020). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018.
- Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?. *The Lancet*, 395(10228), 931-934.
- Azzahra, N. F. (2020). Addressing Distance Learning Barriers in Indonesia Amid the Covid-19 Pandemic. <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6247>
- Barua, S. (2020). Understanding Coronanomics: The economic implications of the coronavirus (COVID-19) pandemic. *SSRN Electronic Journal* <https://doi.org/10/ggq92n>.
- Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirsch, V., Schuwer, R., Egorov, G.,... & Rodes, V. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. *Asian Journal of Distance Education*, 15(1), 1-126.
- Brouder, P. (2020). Reset redux: possible evolutionary pathways towards the transformation of tourism in a COVID-19 world. *Tourism Geographies*, 1-7.
- Dawes, S. S. (2010). Stewardship and usefulness: Policy principles for information-based transparency. *Government Information Quarterly*, 27(4), 377-383.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Mahfud, C., Sudjatma, A., Indrawan, M.,... & Gunawan, L. A. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 100091.
- Djalante, R., Thomalla, F., Sinapoy, M. S., & Carnegie, M. (2012). Building resilience to natural hazards in Indonesia: progress and challenges in implementing the Hyogo Framework for Action. *Natural Hazards*, 62(3), 779-803.
- Doh, J. P., & Guay, T. R. (2006). Corporate social responsibility, public policy, and NGO activism in Europe and the United States: An institutional- stakeholder perspective. *Journal of Management studies*, 43(1), 47-73.
- Driggin, E., Madhavan, M. V., Bikdeli, B., Chuich, T., Laracy, J., Biondi-Zoccai, G.,... & Brodie, D. (2020). Cardiovascular considerations for patients, health care workers, and health systems during the COVID-19 pandemic. *Journal of the American College of Cardiology*, 75(18), 2352-2371.
- Eichenbaum, M. S., Rebelo, S., & Trabandt, M. (2020). *The macroeconomics of epidemics* (No. w26882). National Bureau of Economic Research.
- Estadilla, L. S. (2020). The Economics of COVID-19 in the Philippines. *Eubios Journal of Asian and International Bioethics*, 30(9), 178.
- Guerrieri, V., Lorenzoni, G., Straub, L., & Werning, I. (2020). *Macroeconomic Implications of COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages?* (No. w26918). National Bureau of Economic Research.

- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2015). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Bogor. Deepublish.
- Hankivsky, O., Grace, D., Hunting, G., Giesbrecht, M., Fridkin, A., Rudrum, S.,... & Clark, N. (2014). An intersectionality-based policy analysis framework: critical reflections on a methodology for advancing equity. *International journal for equity in health*, 13(1), 119.
- Jackson, D., Bradbury- Jones, C., Baptiste, D., Gelling, L., Morin, K., Neville, S., & Smith, G. D. (2020). Life in the pandemic: Some reflections on nursing in the context of COVID- 19. *Journal of clinical nursing*.
- Khan, N., & Faisal, S. (2020). Epidemiology of Corona virus in the world and its effects on the China economy. Available at SSRN 3548292.
- Kolstad, I., & Wiig, A. (2009). Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries?. *World development*, 37(3), 521-532.
- Lalon, R. M. (2020). COVID-19 vs Bangladesh: Is it Possible to Recover the Impending Economic Distress Amid this Pandemic?. *Journal of Economics and Business*, 3(2).
- Loayza, N. V., & Pennings, S. (2020). Macroeconomic policy in the time of COVID-19: A primer for developing countries. 147291. <https://doi.org/10.1596/33540>.
- Maliszewska, M., Mattoo, A., & Van Der Mensbrughe, D. (2020). The potential impact of COVID-19 on GDP and trade: A preliminary assessment.
- Mas'udi, Wawan & Astrina, Azifah (2020a). "Problematika Kebijakan Krisis COVID-19 di Indonesia". Policy Brief. Edisi 1. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Mazza, M., Marano, G., Lai, C., Janiri, L., & Sani, G. (2020). Danger in danger: Interpersonal violence during COVID-19 quarantine. *Psychiatry research*, 113046.
- Mueller, N., & Chancellery, S. F. (2010). Proposition for a multi-dimensional, integrated approach for a crisis management system on a national level. In *14th Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM) Conference, Berne*.
- Muzakki, F. (2020). The Global Political Economy Impact of Covid-19 and The Implication to Indonesia. *Journal of Social Political Sciences*, 1(2), 76-92.
- Orleans, L. A., is Vice, H., & Manchikanti, L. (2020). Expanded umbilical cord mesenchymal stem cells (UC-MSCs) as a therapeutic strategy in managing critically ill COVID-19 patients: the case for compassionate use. *Pain physician*, 23, E71-E83.
- Persson, H., Åhman, H., Yngling, A. A., & Gulliksen, J. (2015). Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects. *Universal Access in the Information Society*, 14(4), 505-526.
- Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A.,... & Agha, R. (2020). World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery*.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. SMERU Working Paper.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism management*, 21(6), 613-633.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 227-238.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta. Prenada Media.
- Zhang, L., Jiang, Y., Wei, M., Cheng, B. H., Zhou, X. C., Li, J.,... & Hu, R. H. (2020). Analysis of the pregnancy outcomes in pregnant women with COVID-19 in Hubei Province. *Zhonghua fu chan ke za zhi*, 55, E009-E009.